

Judul : Harga BBM nonsubsidi turun, Senayan senang pemerintah jaga daya beli masyarakat
Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Harga BBM Nonsubsidi Turun

Senayan Senang Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

Senayan menyambut baik langkah Pemerintah bersama PT Pertamina melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026. Penurunan harga tersebut merupakan kabar baik karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas energi.

ANGGOTA Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu mengatakan, mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi semakin adaptif terhadap perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pemerintah dinilai berhasil dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah volatilitas harga minyak internasional. Juga memastikan kebijakan energi tetap memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat.

"Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menciptakan tata kelola energi yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional," ujar Christiany di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Diketahui, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi secara bertahap per 1 Agustus 2026. Harga Pertamina Green 95 turun dari Rp 17.000 menjadi Rp 16.600 per liter, serta Pertamina Turbo turun dari Rp

19.300 menjadi Rp 18.300 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi jenis Pertalite tetap Rp 10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.

Dengan turunnya harga BBM nonsubsidi, Christiany berharap, masyarakat yang menggunakan BBM jenis tersebut tetap memperoleh perlindungan dari sisi harga. Langkah tersebut juga menunjukkan komitmen BUMN energi dalam menjalankan fungsi komersial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau.

Dia menilai, sinergi antara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina perlu terus diperkuat agar kebijakan energi nasional mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena stabilitas harga BBM memiliki dampak langsung terhadap biaya distribusi logistik, harga kebutuhan pokok, sektor industri, hingga inflasi nasional.

Dia berharap, kebijakan penye-



Christiany Eugenia

suain harga tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Tentunya tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor energi nasional.

"Komitmen Pemerintah bersama Pertamina yang terus menghadirkan kebijakan harga yang adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat patut diapresiasi," puji politisi Golkar ini.

Ke depan, dia berharap, koordinasi antara Pemerintah dan badan usaha energi terus diperkuat agar masyarakat memperoleh pasokan energi yang aman, harga yang kompetitif, serta kepastian layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Christiany menambahkan, sektor energi memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah bersama Pertamina dan seluruh badan usaha penyedia BBM kudu terus menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memastikan setiap kebijakan penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan berbasis kondisi pasar yang objektif.

"Sehingga stabilitas energi nasional dapat terus terjaga, daya saing dunia usaha meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat," imbuh legislator asal Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Anggota Komisi XII DPR Yulisman menambahkan, penurunan harga Pertamina Green 95, dan Pertamina Turbo menjadi sinyal positif Pemerintah menjalankan mekanisme penyesuaian harga secara transparan dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini juga memperlihatkan keseimbangan antara menjaga ketahanan energi nasional, keberlanjutan investasi, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

"Penurunan harga BBM nonsubsidi menunjukkan ketika harga minyak dunia menurun, Pemerintah memastikan man-

faatnya juga dapat dirasakan masyarakat," ujar Yulisman di Jakarta, Selasa (3/8/2026).

Menurut Yulisman, kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya transportasi, logistik, dan distribusi barang sehingga dapat meningkatkan daya saing dunia usaha. Kondisi ini juga diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

la menambahkan, keberhasilan menjaga stabilitas sektor energi tidak hanya diukur dari kecukupan pasokan, tetapi juga dari kemampuan Pemerintah menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. "Jadi sinergi antara Pemerintah, BUMN energi, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat," tandas politisi Golkar ini.

Dia berharap, kebijakan energi yang adaptif seperti ini terus dipertahankan. Ketika harga energi global bergerak turun, masyarakat perlu ikut merasakan manfaatnya, sementara ketahanan energi nasional dan iklim investasi tetap terjaga.

"Kami siap mengawal kebijakan tersebut agar berjalan secara konsisten dan berkelanjutan," tutup legislator asal Riau ini. ■ TIF